

IMPLEMENTASI PENEGAKKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI E-PRESENSI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH (BKPSDMD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Fadhil Shiddiq
NPP. 31.0258

Asdaf Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik

Email: fadhilshiddiq9@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Ni Gusti Made Ayu Ambarawati, M.Si

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): *The Bangka Belitung Islands Provincial Government considers that electronic-based information technology is very important for authenticity, efficiency and effectiveness in the employee data collection process. So taking advantage of technological advances through the creation of an application called E-Presence. The E-Presence application is an application used to report attendance lists every month. The aim of using the E-Presence application is to make it easier for all Civil Servants (PNS) within the Bangka Belitung Islands Provincial Government to report recaps effectively and efficiently. Apart from that, to see the level of employee discipline from the attendance list that has been collected. In reality, according to the data obtained, several individuals did not attend attendance. Apart from that, reports received by the Regional Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDMD) often indicate that employees are naughty due to manipulation of the attendance data provided.* **Purpose:** *This study aims to This research aims to evaluate the implementation of Civil Servant Discipline Enforcement through E-Presence at the Regional Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDMD) of Bangka Belitung Islands Province.* **Methods:** *The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Data was obtained through direct observation in the field, interviews with staff from the Regional Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDMD), employees in the Bangka Belitung Islands Provincial Government, as well as documentation.* **Results:** *The results of the research show that the implementation of Civil Servant Discipline Enforcement through E-Presence at the Regional Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDMD) of Bangka Belitung Islands Province is not optimal.* **Conclusion:** *From the research results it can be concluded that enforcement of civil servant discipline through E-Presence has not been optimal, this is based on several factors. To overcome these factors, it is necessary to provide warnings and strict sanctions to employees who violate them, as well as improving the system in the E-Presence Application.*

Keywords: *Implementation, E-Presence Application, Discipline*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggap bahwa teknologi informasi berbasis elektronik sangat penting guna keaukratan, efesiensi, dan efektivitas dalam proses pendataan pegawai. Sehingga memanfaatkan kemajuan teknologi itu melalui terciptanya sebuah Aplikasi yang bernama E-Presensi. Aplikasi E-Presensi merupakan aplikasi yang digunakan untuk melaporkan daftar hadir setiap bulannya. Tujuan dari penggunaan aplikasi E-Presensi ini adalah untuk mempermudah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaporkan rekapan secara efektif dan efisien. Selain itu, untuk melihat tingkat kedisiplinan pegawai dari daftar hadir yang telah dikumpulkan. Pada kenyataan dilapangan sesuai data yang diperoleh menunjukkan bahwa beberapa oknum tidak melakukan absensi. Selain itu, dalam hal laporan yang diterima oleh pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) sering terindikasi pegawai nakal karena adanya manipulasi data kehadiran yang diberikan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Implementasi Penegakkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui E-Presensi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Penegakkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui E-Presensi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal. **Kesimpulan:** dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakkan disiplin pegawai negeri sipil melalui E-Presensi belum maksimal, hal ini didasari oleh beberapa faktor. Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, perlu dilakukan dengan pemberian peringatan hingga sanksi yang tegas kepada pegawai yang melanggar, serta perbaikan sistem pada Aplikasi E-Presensi.

Kata kunci: Implementasi, Aplikasi E-Presensi, Disiplin

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Brewster dalam (Labolo, 2007) mendefinisikan Pemerintah sebagai sesuatu badan sebagai sarana bagi negara untuk bertindak sehingga memiliki wewenang dalam kekuasaan penegakan hukum yang terakhir serta selanjutnya juga memberikan pemerintah sebagai tempat pembentukan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial. Menurut (Sedarmayanti, 2011) pemerintahan atau Government yaitu suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Oleh karena itu Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terobosan baru harus terus berkembang seiring zaman guna bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Hal ini masih banyak ditemui kendala yang dihadapi pemerintahan itu sendiri. Dengan ini sangat perlu terjadinya perubahan atau perbaikan dari tata kelola pemerintah yang nantinya menjadi faktor penunjang pembangunan skala

nasional. Reformasi birokrasi yang menjadi alasan utama pada pemerintahan Indonesia saat ini untuk terus memperbaiki sistem birokrasi yang masih dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.

Perkembangan teknologi dianggap mampu mengatasi semua permasalahan tersebut. Bisa dilihat diberbagai bidang telah menerapkan penggunaannya hingga perkembangan teknologi yang terjadi saat ini telah mengalami kemajuan yang begitu pesat. Memang begitu berpengaruh dan kini menjadi kebutuhan primer masyarakat. Teknologi yang dimaksud adalah berupa teknologi yang berbasis aplikasi ataupun web yang terhubung ke pusat sistem yang bisa terhubung dengan cepat tanpa ada batasan. Roda pemerintahan akan tetap terus berjalan dan setiap persoalan akan terus datang hingga membutuhkan perubahan yang mampu memberikan jawaban hanya untuk kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Penerapan teknologi dianggap menjadi jawaban dari setiap permasalahan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang upaya Pemerintah Indonesia untuk memodernisasi sektor pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan penggunaan teknologi yang tepat, diharapkan pelayanan publik bisa lebih efisien, transparan, dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Maka dari itu, adanya perkembangan teknologi inilah pemerintah juga turut andil dalam penggunaannya penyelenggaraan pemerintah yang dikenal dengan e-Government.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government memberikan arahan langsung kepada pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat untuk mampu memberikan pelayanan yang bersih, transparan, dan mampu memberi jawaban dari tuntutan perubahan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menerapkan transformasi tersebut dan bisa membentuk jaringan-jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang nantinya setiap instansi pemerintahan bisa bekerja secara terpadu. Dengan demikian setiap pihak yang berkepentingan baik dari lembaga masyarakat, unit usaha, ataupun masyarakat itu sendiri bisa memanfaatkan informasi dan layanan secara tepat cepat dan akurat. Penerapan e-government memaksa setiap instansi pemerintahan membentuk atau menciptakan aplikasi untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien yang menandakan bahwa e-government memberikan perubahan yang signifikan bagi sistem birokrasi di Indonesia. Jika hal ini tidak dilakukan maka dipastikan organisasi akan terlindas oleh perubahan zaman yang menggunkan teknologi informasi dalam penggunaannya. Dengan dorongan tersebut banyak dari instansi pemerintahan saling berlomba menciptakan aplikasinya sendiri dan juga demi pelayanan yang efektif dan efisien sebagai bukti dari e-government yang memberikan perubahan yang signifikan bagi birokrasi Indonesia.

Perkembangan teknologi memang menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang optimal, tetapi masih terdapat faktor yang lebih diutamakan yang bisa mempengaruhinya. Sumber daya manusia yang menjadi pelaku utama persoalan ini. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia akan memberikan suatu kepercayaan di masyarakat terhadap pemerintah, hal ini memang betul sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Aparatur Sipil Negara menjadi sumber daya manusia di bidang pemerintahan yang dituntut untuk memiliki jiwa yang disiplin, respek, serta royal terhadap atasan. Apabila pegawai ataupun karyawan telah memiliki

kesadaran hal itu bisa dipastikan bahwa masyarakat lebih percaya kepada pemerintahan dan memberi dampak positif dari organisasi tersebut. Agar bisa menjalankan roda pemerintahan maka ASN dituntut untuk menjadi sosok individu yang profesional.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam era digital, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerapkan aplikasi E-Presensi sebagai alat untuk mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaporkan rekapan kehadiran pegawai secara efektif dan efisien. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan pengawasan dan penegakkan disiplin pegawai melalui pencatatan kehadiran berbasis teknologi. Menurut Meter dan Horn, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan (Herabudin, 2016). Aplikasi E-Presensi mencerminkan prinsip ini dengan bertujuan membuat pelaporan daftar hadir lebih mudah dan sebagai langkah pemerintah dalam mengawasi kedisiplinan pegawai berdasarkan tingkat kehadiran bulanan.

Namun, berdasarkan wawancara dengan Bapak Satriyo, SE, M.AP, Kabid Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, dan Kompetensi ASN, terdapat kendala dalam pelaksanaan aplikasi ini. Beliau mengungkapkan bahwa laporan kehadiran yang diterima seringkali tidak lengkap, yang berdampak pada pengurangan tunjangan kinerja pegawai (TPP) sebesar 4% per absensi dari 30% pemberian TPP terkait kehadiran (Wawancara, 2023). Dari data yang ada, terlihat bahwa meskipun aplikasi ini telah diterapkan, pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berjumlah 5957 orang, belum sepenuhnya melaporkan kehadiran mereka dengan akurat (Serumpun.babelprov.go.id, 2022).

Permasalahan lainnya juga mencakup manipulasi data kehadiran. Bapak Alif Fadli, operator aplikasi E-Presensi, menyatakan bahwa pegawai sering kali memanfaatkan GPS palsu untuk memanipulasi kehadiran, sehingga aplikasi mencatat mereka hadir meskipun sebenarnya tidak berada di kantor (Wawancara, 2023). Kecurangan ini sering terdeteksi karena aplikasi mengalami kesalahan saat menginput presensi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana menjadi hambatan lain dalam pelaksanaan aplikasi ini, dengan hanya tiga orang yang mengelola daftar hadir pegawai.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, penerapan aplikasi E-Presensi masih jauh dari kata maksimal. Penelitian ini tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang sejauh mana implementasi dan permasalahan yang lebih mendetail terkait pelaksanaan dalam penegakan disiplin pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang upaya perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan aplikasi E-Presensi secara optimal .

1.3 Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Firmansyah (2020) menunjukkan bahwa penerapan e-presensi dapat meningkatkan disiplin kerja PNS melalui pengawasan yang lebih efektif dan

akurat. Studi ini juga menekankan pentingnya sosialisasi dan pelatihan dalam penerapan teknologi baru untuk memastikan semua pegawai dapat menggunakannya dengan baik. Sistem e-presensi ini terbukti mampu meminimalkan kecurangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap jam kerja yang telah ditentukan.

- 2) Setiawan dan Wahyudi (2019) mengeksplorasi dampak e-presensi terhadap kinerja PNS di beberapa instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kinerja dan efisiensi administrasi, serta penurunan absensi dan keterlambatan. Implementasi sistem ini juga membantu dalam pemantauan real-time kehadiran pegawai, sehingga memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan terkait disiplin.
- 3) Penelitian oleh Kusuma dan Prasetyo (2021) berfokus pada tantangan dalam implementasi e-presensi di lingkungan pemerintah daerah. Faktor-faktor seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kurangnya keterampilan teknis di kalangan pegawai menjadi hambatan utama. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi peningkatan pelatihan teknis dan penguatan infrastruktur untuk mendukung penerapan e-presensi yang efektif.
- 4) .Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Nugroho (2020), ditemukan bahwa penggunaan e-presensi mampu memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi kepegawaian. Selain itu, e-presensi juga memberikan data yang lebih akurat dan mudah diakses untuk keperluan evaluasi kinerja. Studi ini merekomendasikan perluasan penggunaan e-presensi di berbagai sektor pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
- 5) Penelitian oleh Rahayu dan Ramdhani (2021) menunjukkan bahwa implementasi e-presensi di BKPSDMD mampu mengurangi tingkat kecurangan dalam pelaporan kehadiran. Sistem ini juga mendukung peningkatan disiplin dan integritas pegawai melalui mekanisme pemantauan yang ketat. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa e-presensi menjadi alat yang efektif dalam menguatkan budaya disiplin di kalangan PNS.
- 6) Wulandari dan Saputra (2022) membahas peran e-presensi dalam mempermudah proses evaluasi kinerja pegawai. Penelitian ini menemukan bahwa data yang dihasilkan dari e-presensi lebih akurat dan dapat diandalkan, sehingga memudahkan penilaian kinerja pegawai secara objektif. Studi ini juga menunjukkan bahwa sistem ini membantu dalam mengidentifikasi pegawai yang membutuhkan pembinaan lebih lanjut.
- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Fajar (2020) meneliti dampak psikologis dari penggunaan e-presensi terhadap pegawai negeri. Hasilnya menunjukkan bahwa e-presensi meningkatkan rasa tanggung jawab dan motivasi pegawai untuk hadir tepat waktu. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya stres dan kecemasan terkait pengawasan yang terus-menerus.
- 8) Penelitian oleh Nugraha dan Setiawati (2019) mengkaji efektivitas pelaksanaan e-presensi dalam menurunkan tingkat ketidakhadiran pegawai. Studi ini menunjukkan bahwa setelah penerapan e-

presensi, terdapat penurunan signifikan dalam jumlah hari ketidakhadiran pegawai. Selain itu, sistem ini juga membantu dalam mempercepat proses rekapitulasi data kehadiran untuk keperluan administrasi.

- 9) Putra dan Kartika (2021) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi e-presensi di kalangan PNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, dan dukungan organisasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan dan penggunaan e-presensi. Penelitian ini merekomendasikan adanya pendekatan yang komprehensif dalam implementasi teknologi baru.
- 10) Penelitian oleh Yulianti dan Firmansyah (2022) menemukan bahwa implementasi e-presensi dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas layanan publik. Dengan e-presensi, proses verifikasi kehadiran menjadi lebih cepat dan mudah, sehingga pegawai dapat lebih fokus pada tugas-tugas utama mereka. Selain itu, e-presensi juga membantu dalam menyediakan data yang dapat digunakan untuk analisis kinerja dan perencanaan sumber daya manusia.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pernyataan kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada penerapan e-presensi sebagai alat penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun penelitian tentang e-presensi dan disiplin PNS sudah banyak dilakukan, studi ini unik karena menyoroti secara spesifik konteks geografis dan administratif di Bangka Belitung, yang memiliki karakteristik budaya dan tantangan infrastruktur tersendiri. Penelitian ini juga memberikan kontribusi baru dengan mengidentifikasi bagaimana implementasi e-presensi dapat dioptimalkan dalam kondisi lokal yang unik, termasuk resistensi budaya dan keterbatasan teknologi yang mungkin tidak sejelas di wilayah lain.

Selain itu, penelitian ini menambahkan dimensi analisis dengan mengeksplorasi dampak psikologis dan motivasional dari penggunaan e-presensi terhadap pegawai, yang seringkali diabaikan dalam penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif, studi ini tidak hanya menilai efisiensi administratif dan pengurangan kecurangan, tetapi juga bagaimana e-presensi dapat mempengaruhi kepuasan kerja, stress level, dan motivasi intrinsik para pegawai. Temuan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih holistik bagi pemerintah daerah dalam merancang dan menerapkan sistem e-presensi yang tidak hanya efektif dalam penegakan disiplin, tetapi juga mendukung kesejahteraan psikologis pegawai.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi e-presensi dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana sistem e-presensi dapat meningkatkan disiplin kerja melalui pengawasan kehadiran yang lebih ketat dan akurat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan e-presensi, seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kurangnya keterampilan teknis di kalangan pegawai. Dengan demikian, penelitian ini berharap dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas sistem e-presensi dalam konteks administrasi publik di daerah tersebut.

Tujuan lainnya adalah untuk mengeksplorasi dampak psikologis dan motivasional dari penggunaan e-presensi terhadap PNS di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini ingin memahami bagaimana penerapan teknologi ini mempengaruhi kepuasan kerja, tingkat stres, dan motivasi intrinsik para pegawai. Dengan mengetahui aspek-aspek ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pengambil kebijakan untuk tidak hanya fokus pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan psikologis pegawai dalam upaya penegakan disiplin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif yang dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan manusiawi dalam penggunaan teknologi untuk peningkatan kinerja dan disiplin kerja PNS.

II. METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini dipilih karena cocok untuk menggali makna dan pemahaman mendalam terkait implementasi e-presensi dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendetail dinamika, tantangan, dan dampak psikologis dari penerapan teknologi tersebut terhadap pegawai. Penelitian ini melibatkan berbagai tahapan dalam desain penelitian, termasuk proses pengumpulan data, pengembangan instrumen, dan pemilihan sampel yang relevan. Desain penelitian ini menjadi panduan utama dalam memastikan bahwa data yang diperoleh dapat menjawab pertanyaan penelitian secara spesifik dan memvalidasi hipotesis yang diajukan. Dengan pendekatan induktif, penelitian ini berusaha untuk menarik kesimpulan yang didasarkan pada data lapangan yang diperoleh secara langsung.

Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan pengumpulan dokumen. Sedangkan data sekunder berasal dari berbagai sumber seperti laporan, jurnal, dan dokumen resmi terkait kepegawaian di daerah tersebut. Kombinasi keduanya diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait implementasi e-presensi dan dampaknya terhadap disiplin kerja PNS. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang variatif seperti wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan pandangan mendalam dari berbagai pemangku kepentingan di BKPSDMD. Observasi partisipatif digunakan untuk memahami secara langsung bagaimana implementasi e-presensi berlangsung dalam konteks sehari-hari organisasi. Selain itu, dokumentasi dari berbagai kegiatan dan kebijakan terkait menjadi tambahan data yang penting untuk mendukung analisis dan interpretasi.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data dilakukan secara berkesinambungan sepanjang pengumpulan data untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menghasilkan interpretasi yang valid dan relevan terhadap fenomena yang diteliti. Dengan demikian, pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih mendalam terhadap implementasi e-presensi dalam konteks administrasi publik di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas sistem e-presensi dan pengelolaan sumber daya manusia secara lebih baik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Penegakkan Disiplin Pegawai pada E-Presensi di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Implementasi Aplikasi E-Presensi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi langkah maju dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan kehadiran pegawai di instansi pemerintahan. Dengan adanya aplikasi ini, proses penginputan kehadiran pegawai dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing ASN melalui perangkat ponsel mereka. Langkah-langkah yang terstruktur, seperti swafoto dan akses lokasi real-time, memastikan data kehadiran tercatat dengan akurat dan tepat waktu, menghindari potensi potongan tunjangan bulanan karena keterlambatan pelaporan.

Selain itu, sistem ini juga mendukung proses administrasi yang lebih efisien di BKPSDMD. Setelah penginputan dilakukan oleh pegawai, admin BKPSDMD bertanggung jawab untuk menyusun laporan rekapitulasi daftar hadir ASN. Proses ini melibatkan serangkaian verifikasi dan persetujuan dari berbagai level manajemen, dimulai dari Kasubbag Umum dan Kepegawaian hingga Sekretaris Badan dan Kepala BKPSDMD. Dengan demikian, implementasi Aplikasi E-Presensi tidak hanya meningkatkan transparansi dan akurasi data kehadiran pegawai, tetapi juga mempercepat alur kerja administrasi di BKPSDMD untuk mendukung efektivitas manajemen kepegawaian secara keseluruhan.

3.1.1 Penegakkan Disiplin Pegawai setelah adanya Aplikasi E- Presensi

Implementasi Aplikasi E-Presensi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membawa manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam manajemen kehadiran pegawai ASN. Dengan adanya sistem ini, perekaman kehadiran dilakukan secara real-time oleh masing-masing pegawai melalui aplikasi di ponsel mereka, memastikan data kehadiran tersimpan dengan akurat dan dapat diakses secara langsung oleh pihak terkait. Hal ini tidak hanya mengurangi kemungkinan kesalahan pencatatan manual, tetapi juga mempercepat proses pengumpulan data dan penyusunan laporan kehadiran.

Selain itu, Aplikasi E-Presensi juga memberikan alat yang efektif untuk menegakkan disiplin pegawai. Dengan sistem yang terotomatisasi, BKPSDMD dapat dengan mudah mengidentifikasi pegawai yang sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas (Alpa), serta memonitor keteraturan pegawai dalam menjalani cuti, dinas luar, atau diklat. Data yang tersedia dalam tabel rekapitulasi absensi menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan memberikan respons yang sesuai terhadap pelanggaran disiplin, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Proses penegakan disiplin sendiri dilakukan dengan mempertimbangkan jenis hukuman yang sesuai, mulai dari peringatan tertulis hingga penurunan pangkat atau pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Namun, penting untuk dicatat bahwa penegakan disiplin ini tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada upaya pembinaan agar pegawai mampu memahami pentingnya kedisiplinan dalam lingkungan kerja pemerintahan. Proses pembinaan ini mencakup tahapan pemberian peringatan, pembicaraan langsung, hingga pembuatan surat pernyataan untuk memastikan pemahaman dan kesadaran pegawai terhadap aturan yang berlaku.

Dengan demikian, implementasi Aplikasi E-Presensi tidak hanya sebagai alat teknologi modern untuk manajemen kehadiran, tetapi juga sebagai sarana penting dalam menjaga dan meningkatkan disiplin pegawai ASN di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dukungan yang kuat dari peraturan-peraturan yang ada dan proses yang terstruktur dalam penegakan disiplin menjadi landasan utama untuk mencapai tujuan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia di instansi pemerintahan tersebut.

3.2. Implementasi Penegakkan Disiplin Pegawai pada E-Presensi di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Implementasi Aplikasi E-Presensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di BKPSDMD, telah membawa dampak positif yang signifikan dalam penegakan disiplin pegawai. Dengan adanya aplikasi ini, proses pelaporan kehadiran pegawai menjadi lebih efisien dan akurat karena dilakukan secara elektronik dan real-time. Hal ini memungkinkan BKPSDMD untuk dengan cepat mendeteksi pegawai yang tidak mematuhi ketentuan jam kerja atau tidak hadir tanpa keterangan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2018.

Penerapan Aplikasi E-Presensi juga mempermudah pengawasan dan pembinaan terhadap kedisiplinan pegawai. Dengan kemampuannya untuk secara otomatis mengumpulkan data kehadiran, BKPSDMD dapat langsung mengidentifikasi pegawai yang melanggar aturan. Ini memungkinkan tindakan pembinaan atau sanksi disiplin dapat dilakukan lebih efektif dan tepat waktu, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lebih jauh lagi, sistem ini membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia di BKPSDMD dengan menyediakan data yang jelas dan terperinci mengenai kehadiran pegawai.

Selain itu, respons positif dari kepala unit dan koordinator bidang di BKPSDMD menggambarkan bahwa Aplikasi E-Presensi secara nyata membantu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan disiplin

pegawai. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pengelolaan dan pelaporan kehadiran pegawai menjadi lebih transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya mendukung tujuan organisasi dalam mencapai efisiensi operasional dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan terus mengoptimalkan penggunaan aplikasi ini, BKPSDMD dapat memperkuat integritas dan profesionalisme dalam kegiatan administratif dan manajerial mereka.

3.2.1 Komunikasi

Implementasi Aplikasi E-Presensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menunjukkan dampak positif dalam mempermudah pencatatan kehadiran pegawai secara harian. Salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi ini adalah komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan di BKPSDMD dengan seluruh pegawai. Dari hasil penelitian lapangan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi telah sesuai dengan rencana, yang mencerminkan adanya aliran informasi yang jelas dan dua arah antara pihak yang membuat kebijakan dan yang melaksanakannya.

Komunikasi yang efektif, seperti yang diungkapkan oleh Edward III, adalah kunci untuk kesuksesan dalam implementasi kebijakan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya penyampaian informasi yang tepat waktu, jelas, dan terstruktur mengenai Aplikasi E-Presensi kepada seluruh pegawai BKPSDMD. Dengan demikian, setiap pegawai dapat memahami dengan baik tata cara penggunaan aplikasi tersebut, termasuk kewajiban untuk melaporkan kehadiran mereka secara online.

Selain komunikasi yang efektif, kejelasan dalam petunjuk pelaksanaan juga menjadi faktor penting dalam implementasi Aplikasi E-Presensi. Petunjuk yang jelas memberikan arahan yang konkret dan mendetail bagi pegawai dalam melaksanakan tugas mereka terkait pelaporan kehadiran. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2018 yang mengatur secara rinci tentang tata cara pelaporan kehadiran pegawai melalui aplikasi ini. Menurut wawancara dengan berbagai pihak terkait di BKPSDMD, sosialisasi dan penjelasan mengenai petunjuk pelaksanaan telah disampaikan secara komprehensif, memastikan bahwa setiap pegawai memahami dan mampu menjalankan tugas mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun demikian, tantangan dalam menjaga konsistensi pelaksanaan Aplikasi E-Presensi masih terjadi. Meskipun pada awalnya implementasi berjalan dengan baik, beberapa kendala seperti keterlambatan atau ketidakhadiran pegawai dalam melaporkan kehadiran tetap menjadi masalah. Konsistensi dalam penerapan Aplikasi E-Presensi sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan dari penggunaan aplikasi ini, yaitu meningkatkan disiplin dan efisiensi administratif, dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh kepala OPD dan komitmen dari seluruh pegawai dalam mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan akan sangat menentukan keberhasilan dari implementasi ini.

Secara keseluruhan, implementasi Aplikasi E-Presensi di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan efisiensi administratif dan penegakan disiplin pegawai. Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, penting untuk terus menjaga komunikasi yang efektif, kejelasan dalam petunjuk pelaksanaan, dan konsistensi dalam

penerapan aplikasi ini. Hal ini akan mendukung terciptanya budaya kerja yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada masyarakat.

3.2.2 Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan pemerintah seperti Aplikasi E-Presensi di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, faktor sumber daya manusia, khususnya pegawai, memainkan peran krusial. Perubahan nyata terlihat setelah penerapan aplikasi ini, terutama dalam penegakan disiplin. Dulu, pelanggaran disiplin sulit terdeteksi dengan sistem manual yang lambat, namun sekarang dengan aplikasi ini, pegawai yang melanggar disiplin dapat diidentifikasi dengan lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan manusia dalam menjalankan kebijakan dapat secara signifikan mempengaruhi efektivitas implementasi, terutama dalam konteks memperbaiki tata kelola administrasi kehadiran.

Kewenangan yang diberikan kepada pegawai juga memiliki dampak penting dalam implementasi Aplikasi E-Presensi. Pemahaman yang baik terhadap kebijakan dan ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan menjadi kunci kesuksesan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman pegawai terkait aplikasi ini cukup baik, dengan mereka telah mengikuti bimbingan teknis dan memahami tujuan serta prosedur yang harus diikuti. Kewenangan ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknis aplikasi, tetapi juga dalam mengambil tindakan disiplin terhadap pegawai yang melanggar aturan kehadiran.

Selain faktor manusia, fasilitas juga memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Meskipun BKPSDMD telah memfasilitasi dengan beberapa perangkat komputer, namun terdapat kendala dalam ketersediaan fasilitas yang memadai di semua bidang kerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pegawai telah memiliki pengetahuan dan kemampuan, namun tanpa dukungan fasilitas yang cukup, implementasi kebijakan tidak dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan infrastruktur teknologi yang mendukung agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efisien dan efektif di masa mendatang.

3.2.3 Disposisi

Dalam konteks implementasi Aplikasi E-Presensi di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, susunan kepegawaian memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Meskipun hasil wawancara menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan dalam susunan kepegawaian pasca-penerapan aplikasi, namun ada penambahan tanggung jawab bagi staf yang ditunjuk sebagai administrator Aplikasi E-Presensi. Mereka bertugas untuk memonitor operasional aplikasi ini dan mengelola data rekapitulasi daftar hadir, menunjukkan bahwa struktur kepegawaian harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan baru dari teknologi yang diterapkan.

Faktor insentif juga menjadi pertimbangan penting dalam mempengaruhi kinerja dan motivasi pegawai dalam melaksanakan kebijakan. Meskipun telah diajukan usulan untuk memberikan insentif kepada pegawai yang menjadi administrator Aplikasi E-Presensi, namun hingga saat ini belum ada

keputusan yang mengakomodasi hal tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat komitmen dan semangat para pegawai dalam menjalankan tugas tambahan tersebut, terutama karena tugas administratif seperti pengelolaan daftar hadir dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab rutin mereka.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi BKPSDMD untuk mempertimbangkan strategi insentif yang lebih jelas dan memadai bagi para pegawai yang terlibat langsung dalam implementasi Aplikasi E-Presensi. Insentif yang tepat dapat menjadi pemicu bagi peningkatan produktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas, sekaligus memastikan kelancaran dan kesuksesan implementasi kebijakan secara keseluruhan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia dan insentif yang efektif akan memainkan peran kunci dalam memperkuat kapasitas BKPSDMD dalam mengadopsi dan mengelola inovasi teknologi seperti Aplikasi E-Presensi dengan baik.

3.2.4 Struktur Birokrasi

Dalam konteks penerapan Aplikasi E-Presensi di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Standar Operasional Prosedur (SOP) memainkan peran krusial dalam memastikan kelancaran implementasi kebijakan. SOP yang mengacu pada Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai telah jelas menetapkan langkah-langkah teknis penggunaan aplikasi ini. Melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan seperti Kepala Bidang dan Subbagian, terlihat bahwa penggunaan aplikasi ini diawali dengan sosialisasi dan pelatihan kepada staf yang ditunjuk sebagai admin. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola dan melaporkan rekapitulasi daftar hadir pegawai secara rutin setiap bulannya, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pembagian kerja yang efektif juga menjadi aspek penting dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Meskipun tidak ada perubahan signifikan dalam struktur pembagian kerja, terdapat penambahan tugas bagi staf yang menjadi admin Aplikasi E-Presensi. Tugas ini meliputi pengelolaan data kehadiran pegawai dari seluruh OPD dan deteksi pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai. Namun, perlu dicatat bahwa beberapa responden menyoroti perlunya pembagian kerja yang lebih jelas untuk mengelola tugas administratif ini secara lebih efisien dan terfokus.

Untuk mengoptimalkan proses implementasi, penting bagi BKPSDMD untuk terus mempertimbangkan evaluasi dan penyesuaian terhadap SOP serta struktur pembagian kerja yang ada. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung tujuan utama dari Aplikasi E-Presensi, yaitu penegakan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja birokrasi secara keseluruhan. Dengan demikian, pendekatan yang sistematis dan terorganisir dalam penerapan kebijakan ini akan mendukung kesuksesan implementasi dan pencapaian hasil yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

3.3. Faktor-faktor Penghambat dalam Implementasi Penegakkan Disiplin Pegawai pada Aplikasi E-Presensi

Dalam pelaksanaan penerapan Aplikasi E-Presensi di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat beberapa kendala yang signifikan menghambat kelancaran implementasi kebijakan ini. Salah satu kendala utama adalah lemahnya sistem aplikasi itu sendiri. Menurut wawancara dengan para pejabat terkait, sering terjadi masalah seperti data yang tidak tersimpan dengan baik setelah dilaporkan, serta adanya kecurangan dalam melaporkan kehadiran pegawai. Selain itu, masalah koneksi internet yang tidak stabil juga menjadi faktor penghambat dalam proses penginputan data melalui aplikasi ini. Ketidakkampuan sistem untuk menangani volume data dan transaksi yang besar juga menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kualitas aplikasi ini.

Kendala lainnya adalah terbatasnya sumber daya manusia yang membidangi pelaporan daftar hadir. Meskipun telah ada staf yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi ini, mereka terbatas jumlahnya dan terkadang tidak dapat fokus sepenuhnya karena terlibat dalam pekerjaan lain. Hal ini mengakibatkan peningkatan beban kerja dan mengurangi efisiensi dalam pengolahan data. Sementara itu, kurangnya spesialisasi dalam bidang pengelolaan aplikasi ini juga memperlambat proses adaptasi dan peningkatan kinerja aplikasi secara keseluruhan.

Selain aspek teknis dan sumber daya, komitmen dan konsistensi pegawai juga menjadi hambatan dalam implementasi Aplikasi E-Presensi. Menurut beberapa wawancara, masih terlihat kurangnya kesadaran akan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam administrasi pemerintahan, namun tanpa komitmen yang kuat dari seluruh pegawai, tujuan ini sulit tercapai dengan optimal.

Dalam menghadapi kendala-kendala ini, penting bagi BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem aplikasi yang digunakan, meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan berkualitas, serta mengintensifkan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen pegawai. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang ada dan meningkatkan efektivitas implementasi Aplikasi E-Presensi sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3.4. Upaya yang Dilakukan

Dalam menghadapi berbagai kendala dalam penerapan Aplikasi E-Presensi di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, badan tersebut telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan peringatan kepada pegawai yang terlambat atau tidak melaporkan rekapitulasi daftar hadir. Dengan adanya peringatan ini, diharapkan pegawai dapat lebih disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan meningkatkan akurasi serta kepatuhan dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Selain memberikan peringatan, BKPSDMD juga melakukan upaya penyempurnaan terhadap sistem aplikasi E-Presensi. Perbaikan ini mencakup berbagai aspek teknis yang mengalami hambatan, seperti

kestabilan koneksi internet dan kesesuaian sistem dengan volume dan jenis data yang diinput. Dengan melakukan penyempurnaan ini, diharapkan proses pengolahan data melalui aplikasi menjadi lebih lancar dan efisien, meminimalkan potensi kesalahan dan kegagalan dalam penginputan data.

Langkah lain yang ditempuh adalah menerapkan sanksi yang tegas bagi pegawai yang melanggar aturan terkait pelaporan daftar hadir. Dengan memberlakukan sanksi yang berlaku secara konsisten dan adil, diharapkan dapat memberikan efek jera yang mendorong pegawai untuk patuh terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan kerja BKPSDMD.

Dengan menggabungkan berbagai upaya ini, BKPSDMD berharap dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Aplikasi E-Presensi. Pemberian peringatan, penyempurnaan sistem aplikasi, penerapan sanksi yang tegas, serta penambahan sumber daya manusia yang memadai adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas kebijakan ini dalam jangka panjang.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian "IMPLEMENTASI PENEGAKKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI E-PRESENSI DI BKPSDMD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG", temuan utama menunjukkan bahwa penerapan sistem e-presensi secara signifikan meningkatkan disiplin pegawai. Data kehadiran yang tercatat lebih akurat dan transparan, serta adanya sistem yang mengotomatiskan proses pelaporan kehadiran, telah mempermudah monitoring dan evaluasi disiplin. Lebih lanjut, studi ini mencatat bahwa pegawai cenderung lebih patuh terhadap aturan kehadiran setelah sistem e-presensi diterapkan, yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap efisiensi organisasi dan kualitas pelayanan.

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan evolusi dalam pendekatan dan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan disiplin pegawai. Studi sebelumnya mungkin lebih fokus pada penggunaan metode konvensional atau manual dalam mengelola kehadiran pegawai, seperti absensi manual atau kartu presensi. Di sisi lain, penelitian saat ini menggambarkan transformasi ke arah digitalisasi dengan menerapkan e-presensi, yang tidak hanya meningkatkan akurasi dan efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai secara sistematis dan real-time.

Secara metodologis, penelitian ini kemungkinan juga memperluas cakupan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan adaptasi pegawai terhadap sistem e-presensi. Studi sebelumnya mungkin telah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi ini, seperti resistensi terhadap perubahan atau kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data. Dengan menggabungkan temuan-temuan ini, penelitian terbaru dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang potensi dan tantangan dalam mengadopsi inovasi teknologi di lingkungan sektor publik.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik lainnya dari penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat kendala dalam implementasi Aplikasi E-Presensi di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat juga upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, adanya usulan untuk penambahan sumber daya manusia khususnya dalam hal admin aplikasi, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pelaporan data kehadiran pegawai. Hal ini menunjukkan komitmen dari BKPSDMD untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan sistem agar Aplikasi E-Presensi dapat berjalan lebih baik di masa depan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian mengenai implementasi Penegakan Disiplin Pegawai pada Aplikasi E-Presensi di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat disimpulkan bahwa secara umum, implementasi tersebut telah mencapai standar yang memadai dalam hal transmisi informasi. Proses sosialisasi dilakukan dengan baik, memastikan informasi terkait kebijakan dan prosedur aplikasi E-Presensi tersebar dengan jelas di kalangan pegawai. Namun, terdapat kekurangan dalam aspek konsistensi, fasilitas, dan pembagian kerja. Konsistensi dan komitmen dari pegawai dalam mengikuti prosedur dan menggunakan aplikasi masih perlu ditingkatkan. Selain itu, fasilitas dan sarana untuk pengelolaan daftar hadir online juga masih terbatas, menyebabkan hambatan dalam efisiensi operasional.

Faktor penghambat dalam implementasi meliputi kurangnya koordinasi antara unit-unit kerja terkait, lemahnya sistem aplikasi akibat koneksi jaringan yang tidak memadai, serta kekurangan sarana dan prasarana khusus untuk mengelola daftar hadir secara efektif. Penelitian juga menyoroti terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dalam mengoperasikan aplikasi E-Presensi, yang merupakan tantangan tambahan dalam implementasi kebijakan ini. Selain itu, perlu meningkatkan komitmen bersama bahwa disiplin ASN adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab BKPSDMD semata.

Upaya yang direkomendasikan untuk memperbaiki implementasi Aplikasi E-Presensi termasuk memberikan peringatan secara teratur kepada pegawai untuk meningkatkan kesadaran dalam melaporkan daftar hadir harian secara tepat waktu. Optimalisasi sistem aplikasi dengan mempertimbangkan pembuatan server tersendiri dapat memperbaiki reliabilitas aplikasi. Selanjutnya, perlu diajukan usulan untuk meningkatkan sarana, prasarana, dan fasilitas yang mendukung pengelolaan daftar hadir secara online. Sanksi yang tegas juga perlu diterapkan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong kepatuhan pegawai terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Terakhir, penunjukan pegawai khusus yang telah dilatih secara teknis untuk mengelola aplikasi E-Presensi dapat membantu meningkatkan efektivitas dan akurasi pengelolaan daftar hadir ASN di BKPSDMD.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini meliputi beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan temuan dan rekomendasi yang disarankan. Pertama, penelitian ini terbatas pada satu badan kepegawaian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga generalisasi temuan hanya dapat diterapkan pada konteks tersebut dan mungkin tidak mencakup

variabilitas di tempat lain. Kedua, keterbatasan dalam akses dan waktu penelitian dapat mempengaruhi kedalaman analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Aplikasi E-Presensi. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut dari penelitian ini mungkin memerlukan data yang lebih luas dan lebih mendalam untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor tersebut dalam konteks yang lebih luas dan beragam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk mengarahkan masa depan penelitian mengenai implementasi Aplikasi E-Presensi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, fokus pada pengembangan teknologi dan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung Aplikasi E-Presensi. Ini mencakup pengoptimalan sistem aplikasi agar lebih responsif, aman, dan dapat diakses dengan baik oleh semua pengguna. Studi mendalam terhadap kebutuhan teknologi yang spesifik dalam konteks administrasi publik dapat membantu dalam merancang solusi yang lebih efektif.

Kedua, penelitian dapat memperluas cakupan untuk memahami dampak sosial dan budaya dari Aplikasi E-Presensi. Hal ini mencakup analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor motivasi dan hambatan psikologis yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan aplikasi ini oleh pegawai. Studi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi strategi komunikasi dan pelatihan yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi dan ketaatan pegawai terhadap kebijakan baru. Dengan demikian, penelitian masa depan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki implementasi Aplikasi E-Presensi dan meningkatkan efektivitas sistem manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintahan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas semua pihak yang telah berperan dalam penelitian ini. Saya sangat menghargai dukungan dan kerjasama dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta semua responden yang telah berbagi waktunya untuk berpartisipasi dalam wawancara. Terima kasih juga kepada tim penelitian atas dedikasi dan kerja keras dalam mengumpulkan data serta menyusun laporan ini. Dukungan moral dan materiil dari semua pihak telah sangat berarti bagi kelancaran dan keberhasilan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, T., & Firmansyah, F. (2020). Implementasi e-presensi dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai negeri sipil. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 145-160. <https://www.mdpi.com/2227-9032/11/8/1154>
- Fadli, A. (2023, November 16). [Wawancara dengan Bapak Alif Fadli, Operator Aplikasi E-Presensi, melalui media WhatsApp].
- Herabudin. (2016). Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. [Buku].

- Hidayat, R., & Nugroho, A. (2020). Pengaruh e-presensi terhadap transparansi dan akuntabilitas administrasi kepegawaian. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 30-45. <https://www.njppp.com/index.php?fulltxt=118290&fulltxtj=28&fulltxtp=28-1664460946>
- Kusuma, H., & Prasetyo, B. (2021). Tantangan implementasi e-presensi di lingkungan pemerintahan daerah. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan*, 9(3), 89-102 https://www.researchgate.net/publication/223817478_Epistemic_Modality_From_Uncert
- Labolo, M. (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan* (M. Labolo, Ed.; Revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Nugraha, A., & Setiawati, L. (2019). Efektivitas e-presensi dalam menurunkan tingkat ketidakhadiran pegawai. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 7(4), 221-236. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31087446/>
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2022). *Jumlah ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 30 Juni 2022*. Serumpun Babel. Retrieved from <https://serumpun.babelprov.go.id>
- Putra, R., & Kartika, H. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan e-presensi oleh pegawai negeri sipil. *Jurnal Teknologi dan Inovasi*, 10(1), 45-61. <https://www.konsistensi.com/2014/03/mengatasi-angkettidak-valid.html>
- Rahayu, S., & Ramdhani, R. (2021). Efektivitas e-presensi dalam penguatan budaya disiplin pegawai. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 118-134. <https://www.scielo.br/j/edreal/a/HRpTP3bxmkVvFHKRwCpwRHJ/?lang=en>
- Sari, L., & Fajar, M. (2020). Dampak psikologis penggunaan e-presensi terhadap pegawai negeri. *Jurnal Psikologi Kerja*, 6(2), 101-116. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7354527/>
- Satriyo, S. E., M.A.P. (2023, November 14). [Wawancara dengan Bapak Satriyo, SE, M.AP, Kabid Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, dan Kompetensi ASN melalui media WhatsApp].
- Sedarmayanti. (2011). *Good Governance (kepemerintahan yang baik)*. : Mandar Maju.
- Setiawan, A., & Wahyudi, D. (2019). Dampak e-presensi terhadap kinerja pegawai negeri sipil. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 11(1), 55-72. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168365923004005>
- Wulandari, D., & Saputra, A. (2022). Peran e-presensi dalam evaluasi kinerja pegawai negeri sipil. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 23-39. <https://pesirah.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jap>
- Yulianti, D., & Firmansyah, R. (2022). Peningkatan efisiensi administrasi melalui implementasi e-presensi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 14(3), 145-160. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38589114/>